

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI
DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA
KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MUHAMMAD AKHYAR ILMU

NPM : 2022194

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD AKHYAR ILMU

NPM : 2022194

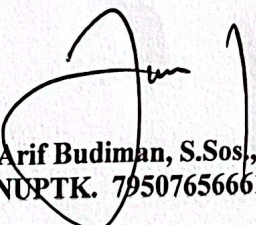
Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES) DI DESA
TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA KABUPATEN
TABALONG"

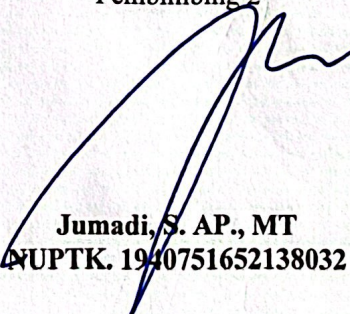
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1


Arif Budiman, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302

Pembimbing 2


Jumadi, S. AP., MT
NUPTK. 1940751652138032



Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak dan langkah beliau hingga akhir zaman, Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang di berikan oleh Allah SWT, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah menyetujui judul skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Jumadi, S.AP, MT. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Para Dosen dan Asisten Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang juga telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai pengetahuan yang berguna bagi penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang juga telah banyak memberikan bantuan material dan spiritual terhadap penulis.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Amuntai, April 2026

Penulis

Muhammad Akhyar Ilmi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pemikiran	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Tipe Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data	41
E. Desain Operasional Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data	46
H. Uji Kredibilitas Data	47
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data	43
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	39
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan . Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, maka kegiatan atau program tersebut dikatakan efektif. Efektivitas sangat penting untuk dicapai dalam setiap kegiatan atau program. Hal ini karena efektivitas menunjukkan bahwa kegiatan atau program tersebut telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan.

Musrenbangdes diharapkan mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui forum ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di

wilayahnya. Dengan demikian, hasil Musrenbangdes seharusnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tahapan, mekanisme, serta prinsip-prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. RPJMDes sebagai dokumen perencanaan jangka menengah desa untuk periode enam tahun, dan RKPDDes sebagai dokumen perencanaan tahunan, memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Melalui dokumen tersebut, arah kebijakan pembangunan desa dapat ditentukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbangdes seringkali belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah masih cenderung terbatas dan didominasi oleh kelompok tertentu, seperti aparat desa atau tokoh masyarakat. Selain itu, usulan program yang dihasilkan tidak selalu berbasis pada kebutuhan prioritas, melainkan lebih pada kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi partisipasi, kualitas perencanaan, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya sinkronisasi antara hasil Musrenbangdes dengan kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga banyak usulan yang tidak terealisasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap proses perencanaan pembangunan yang ada. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian hasil Musrenbangdes kepada masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.

Desa Telaga Itar yang terletak di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, merupakan salah satu desa yang secara rutin melaksanakan Musrenbangdes sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat indikasi bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dalam menyusun rencana pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya program pembangunan yang kurang tepat sasaran, keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam proses

perencanaan, serta kemungkinan adanya kendala dalam koordinasi antar pihak yang terlibat.

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbangdes menjadi aspek penting yang perlu dikaji, karena keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana proses musyawarah tersebut mampu menghasilkan keputusan yang tepat, partisipatif, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan mengukur efektivitas Musrenbangdes, dapat diketahui sejauh mana tujuan dari pelaksanaan forum tersebut telah tercapai, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya.

Dalam Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, peneliti menemukan beberapa fenomena-fenomena atau permasalahan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan dominasi kehadiran oleh aparat desa dan tokoh masyarakat tertentu, sehingga aspirasi masyarakat secara luas belum terakomodasi secara optimal (*Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2026*).
2. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, proses seleksi usulan, serta adanya kemungkinan kepentingan tertentu dalam penentuan program prioritas (*Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2026*).

3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya pemahaman aparat desa dan masyarakat dalam menyusun usulan yang tepat, serta belum maksimalnya penyesuaian program dengan kondisi geografis dan potensi wilayah desa. Akibatnya, program yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan (*Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2026*).

4. Penetapan prioritas program pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat, dengan kecenderungan lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi (*Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2026*).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Dengan menetapkan berbagai kreteria untuk mengukur efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong bisa lebih efektif dan sesuai dengan prosedur.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran

mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Duncan menurut Richad M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54) tentang Efektivitas:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor –faktor yang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Nugraha, Ade Septia (2021)** Dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung”**, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa teratasi, khususnya di daerah Teluk Betung Timur. Bencana banjir yang melanda setiap tahun belum juga diatasi oleh pemerintah. Banyak usulan yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adapun Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo yaitu sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan musrenbang kecamatan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun dalam indikator sistematis dan terpadu sudah efektif tetapi dalam indikator transparan dan akuntabel tidak efektif yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan musrenbang. Masih banyak

usulan-usulan yang mendapat skala prioritas dalam musrenbang kecamatan yang belum juga di realisasi pembangunannya, sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

2. **Abror, Nurul** (2024) Dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara”**, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri I Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) sejatinya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan usulan program dari pemerintahan. Dalam praktiknya, Musrenbang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. salah satu masalah utamanya adalah ketidakmampuan model perencanaan ini tidak mampu memuaskan semua pihak. Hal itu disebabkan desain Musrenbang masih sentralistik (*Top Down Planning*) ditandai dengan pendekatan perencanaan yang seragam antara pusat dan daerah, dan ketergantungan daerah terhadap anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan

peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan., peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena pelaksanaan desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan dengan pendekatan teori Pembangunan Rostow hasil penelitian Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 menunjukkan menunjukkan Kurangnya efektif dalam proses pelaksanaannya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti, terlambatnya realisasi program, keterbatasan anggaran serta tidak terserapnya seluruh hasil musrenbang di Desa Kota Agung oleh Kecamatan Sungkai Selatan.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata efektif memiliki arti efek, akibat, pengaruh atau membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Beni dalam Aryadi Tadi (2020:27) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan

ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo dalam Joko dkk. (2022:8) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Drucker dalam Mutiarin Dyah & Zaenudin Arif (2021:114) menyatakan bahwa “*effective is to do the right things: while efficiency is to do the things right*” (efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar, sementara efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar). Atau juga “*effective means how for we achive the goal and afficiency means how do we mix various properly*”. Efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai tujuan, sementara efisiensi berarti bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan cermat.

Menurut Hidayat dkk. (2024:8) efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dalam suatu tindakan, kegiatan, atau proses. Efektivitas bermakna sebagai ukuran tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh suatu aktivitas tertentu, digunakan untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan dapat tercapai.

Menurut Supriyono dalam Amrizal dkk. (2018:40) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Menurut Hani Handoko dalam Amrizal dkk. (2018:42) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

b. Faktor –faktor yang mempengaruhi efektivitas

Efektivitas merupakan sebagai suatu keberhasilan dalam melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi berhasil dilakukan dengan baik atau tidak.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut steers dalam Vorando Amalo Christo (2019:17-29) sebagai berikut:

1) Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia di tempat manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yaitu:

(a) Aspek lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan keputusan.

(b)Aspek lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3) Karakteristik pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jasi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut hrsus berintegrasi tuuan individu dengan tujuan organisasi.

4) Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen adalah strategi dan meknisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan kebijakan dan praktek manajemen harua memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

c. Ukuran Efektivitas

Menurut Krech dkk. yang dikutip Sudarwan Denim dalam Mudiana dkk. (2024:15) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa ukuran efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

d. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang

didapat tidak sesuai target sasaran yang ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator untuk melihat tingkat efektivitas. Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan menurut Richad M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54).

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh rangkaian usaha yang harus dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Untuk memastikan tujuan akhir dapat tercapai secara optimal, diperlukan tahapan-tahapan yang jelas, baik dalam bentuk pembagian proses pencapaian maupun berdasarkan periode waktu tertentu. Pencapaian tujuan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti jangka waktu pelaksanaan serta sasaran yang menjadi target konkret.

2) Integrasi

Integrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, membangun kesepahaman, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak atau organisasi lain. Dalam hal ini, integrasi berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan organisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dihadapi. Untuk menilai kemampuan adaptasi tersebut, dapat dilihat melalui proses pengadaan serta penempatan sumber daya manusia dalam organisasi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari kajian teoritis yang menjadi dasar dalam memahami variabel penelitian. Oleh karena itu, setiap indikator disusun dengan mengacu pada teori yang relevan agar memiliki kejelasan makna dan dapat diukur secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini disajikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan indikator penelitian.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dalam Monica Feronica Bormasa, S.Sos., M.Si (2022:139).

1) Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan kondisi di mana organisasi memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami

oleh seluruh anggota. Tujuan ini menjadi arah utama sehingga setiap kegiatan yang dilakukan terfokus dan tidak menyimpang.

- 2) **Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**
Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah adanya rencana tindakan atau langkah-langkah yang terarah dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang jelas membantu organisasi menentukan cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya.
- 3) **Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan Yang Mantap**
Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi, data, dan situasi secara mendalam sebelum menetapkan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan harus logis, tepat, dan dapat diterapkan secara efektif.
- 4) **Perencanaan Yang Matang**
Perencanaan yang matang adalah proses penyusunan rencana kerja yang dilakukan secara teliti, terstruktur, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Perencanaan yang matang meminimalkan risiko kegagalan.
- 5) **Penyusunan Program Yang Tepat**
Penyusunan program yang tepat merupakan penjabaran rencana ke dalam program-program kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Program harus relevan, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan yang ada.
- 6) **Tersedianya Sarana Dan Prasarana**
Tersedianya sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas, alat, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.
- 7) **Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik**
Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak hanya bertujuan mengoreksi kesalahan, tetapi juga memberikan pembelajaran dan perbaikan bagi anggota organisasi agar kinerja semakin baik.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Cambel J. P, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:41).

- 1) **Keberhasilan Program**
Keberhasilan program merupakan tingkat tercapainya pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program dikatakan berhasil apabila kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.
- 2) **Keberhasilan Sasaran**
Keberhasilan sasaran adalah sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Indikator ini menekankan pada ketepatan hasil program terhadap target yang ingin dicapai.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat atau menjadi sasaran program, baik itu penerima manfaat maupun pelaksana. Kepuasan ini mencerminkan kualitas hasil dan proses program.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat *input* dan *output* adalah perbandingan antara sumber daya (*input*) yang digunakan, seperti tenaga, biaya, dan waktu, dengan hasil (*output*) yang diperoleh. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa optimal input tersebut menghasilkan output yang maksimal.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan tingkat keberhasilan organisasi atau program dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, tidak hanya sebagian. Indikator ini melihat hasil akhir secara komprehensif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:42).

1) Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan tingkat sejauh mana pihak pelaksana maupun sasaran program memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Pemahaman yang baik akan mendukung kelancaran dan keberhasilan program.

2) Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan kelompok atau objek yang menjadi target. Program dikatakan efektif apabila benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.

3) Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan waktu yang telah direncanakan. Program yang dilaksanakan sesuai jadwal menunjukkan pengelolaan yang baik dan efisien.

4) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan adalah tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan adanya dampak atau hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh sasaran program, baik dalam bentuk peningkatan kondisi, perilaku, maupun kesejahteraan. Perubahan nyata menjadi indikator utama keberhasilan program secara praktis.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Strees, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:53).

1) Produktivitas

Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan *output* secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi hasil yang dicapai dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya.

2) Kemampuan Adaptasi Kerja

Kemampuan adaptasi kerja adalah kemampuan organisasi atau individu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Adaptasi ini penting agar organisasi tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan puas yang dirasakan oleh anggota organisasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk kondisi kerja, hubungan kerja, dan penghargaan yang diterima. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan efektivitas organisasi.

4) Kemampuan Berlaba

Kemampuan berlaba adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh keuntungan atau manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks organisasi bisnis, laba menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

5) Pencarian Sumber Daya

Pencarian sumber daya merupakan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan, seperti tenaga kerja, dana, informasi, dan teknologi. Kemampuan ini menentukan kelangsungan dan efektivitas operasional organisasi.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:55-57).

1) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah direncanakan. Ketepatan waktu menunjukkan disiplin dan kemampuan organisasi dalam mengelola aktivitas secara efisien.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya adalah kemampuan dalam merencanakan dan menggunakan anggaran secara tepat sesuai kebutuhan. Perhitungan biaya yang tepat dapat menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan dana secara optimal.

3) Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran merupakan keakuratan dalam menilai hasil atau kinerja suatu kegiatan. Pengukuran yang tepat menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.

4) Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan adalah kemampuan dalam memilih alternatif tindakan atau keputusan yang paling tepat di antara berbagai pilihan yang ada, berdasarkan pertimbangan rasional dan tujuan yang ingin dicapai.

5) Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir merupakan kemampuan dalam menganalisis masalah secara logis, sistematis, dan objektif. Ketepatan berpikir akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

6) Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

ketepatan dalam melakukan perintah adalah kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau instruksi sesuai dengan arahan yang diberikan. Hal ini mencerminkan disiplin serta kejelasan komunikasi dalam organisasi.

7) Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan kemampuan dalam menetapkan tujuan yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang tepat menjadi dasar dalam menentukan arah kegiatan.

8) Ketepatan-Ketepatan Sasaran

Ketepatan-ketepatan sasaran adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan. Program dikatakan efektif apabila benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Streers (1977), dalam Nur Asni Gani dkk 2020:119-120).

1) Produksi

Produksi merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Produksi menunjukkan tingkat *output* yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*). Efisiensi menunjukkan sejauh mana organisasi mampu menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal.

3) Kepuasan

Kepuasan merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh anggota organisasi maupun pihak yang menerima manfaat. Kepuasan ini berkaitan dengan kondisi kerja, hasil yang diperoleh, serta terpenuhinya harapan.

4) Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Organisasi yang adaptif akan lebih mampu bertahan dan berkembang.

5) Perkembangan

Perkembangan merupakan kemampuan organisasi untuk mengalami kemajuan atau peningkatan dari waktu ke waktu, baik dalam hal kinerja, kualitas sumber daya manusia, maupun inovasi. Perkembangan menunjukkan keberlanjutan efektivitas organisasi dalam jangka panjang.

2. Musyawarah

a. Pengertian Musyawarah

Menurut Budiardjo Miriam dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:50) musyawarah adalah proses pembahasan bersama dalam rangka pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Musyawarah menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi karena bertujuan mencapai kesepakatan (mufakat) yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut Koentjaraningrat dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi (2009:145) musyawarah adalah suatu proses sosial dalam masyarakat yang dilakukan melalui perundingan bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah mencerminkan nilai budaya Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, keharmonisan, dan penghindaran konflik terbuka.

Menurut Az-Zuhaili Wahbah dalam bukunya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (2009:84) musyawarah merupakan suatu proses pertukaran pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu persoalan tertentu dengan tujuan memperoleh keputusan yang

paling benar dan membawa kemaslahatan bersama. Dalam musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif, bukan keputusan sepihak.

Menurut Soekanto Soerjono dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2012: 102) musyawarah adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses komunikasi yang terarah dan terstruktur. Dalam musyawarah, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

Menurut Abdullah Dudung dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (2014:245) musyawarah adalah suatu forum atau majelis yang digunakan untuk menampung berbagai pendapat dan gagasan secara teratur guna mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Menurut Azhari Fitriadi dalam buku Demokrasi dan Autokrasi: Gagasan, Model, dan Rekonstruksi (2019) Musyawarah merupakan konsep dasar dalam demokrasi yang mengandung makna saling memberi pertimbangan untuk mencapai keputusan bersama.

Menurut Muzaqqi Fahrul dalam buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia (2019) Musyawarah adalah tradisi kolektif dalam masyarakat Indonesia yang digunakan untuk menyatukan pendapat melalui proses diskusi demi mencapai mufakat.

Menurut Hafidzi Anwar dalam Pendidikan Bermusyawarah dalam Kehidupan Bernegara (2019) Musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang melalui kesepakatan bersama (mufakat), tidak selalu berdasarkan suara terbanyak.

3. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian Perencanaan

Menurut Djoko Sutarjo dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (2021:121) perencanaan adalah usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan, yang berguna untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjoyo mengartikan sebagai suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan.

Menurut M. Munandar dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (2021:122) perencanaan sebagai penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang akan dilakukandiwaktu perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang yang akan datang. Sedangkan menurut Lincolin Arsyad perencanaan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Conyers & Hills (1994) dalam buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (2010:5) perencanaan adalah suatu proses yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Friedman dalam buku *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (2010:5) perencanaan pada dasarnya adalah cara berpikir tentang masalah sosial dan ekonomi, perencanaan terutama berorientasi pada masa depan, sangat memperhatikan hubungan antara tujuan dengan keputusan kolektif dan berupaya mencapai komprehensivitas dalam kebijakan dan program.

b. Pengertian Pembangunan

Menurut Riyadi (1981) dalam buku *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (2015:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Mardikanto (2009) dalam buku *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (2015:6) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan

dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut buku *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (2015:3) Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

c. Pengertian perencanaan pembangunan

Menurut Arthur W. Lewis (1965) dalam buku *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (2016:24-25) perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Menurut M.L. Jhingan dalam buku *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (2016:25) perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

d. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincolin Arsyad (2001),

menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek. Pengertian dari masing-masing jenis perencanaan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan dewasa ini rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Malah ada pula jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang (*Long-term Planning*) biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif (*Perspective Planning*) yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh ke depan tentang kerangka pembangunan (*Blue-Print*) yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Karena itu, perencanaan jangka panjang lebih bersifat *makro* (menyeluruh) dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (Medium-term Planning) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah terpilih. Di samping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering kali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (*Annual Planning*). Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari Rencana Jangka Menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan

kegiatan. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

e. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan Tahap Pertama adalah penyusunan rencana, Tahap Kedua, penetapan rencana Tahap Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencanaan, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencanaan sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencanaan yang terdapat pada badan perencanaan tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri

oleh badan perencana sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

2. Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada umumnya berjalan lancar bilamana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak dewan. Bahkan adakalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian terhadap rancangan rencana yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai. Selanjutnya perlu pula dievaluasi, bilamana kegiatan dan objek pembangunan dengan yang direncanakan

semula. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Kinerja yang paling kurang didasarkan atas tiga unsur evaluasi utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

4. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Yanti Winda (2020:27) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Ladasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Efendi Rustam (2010:18) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangna untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2002:19) desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yaitu menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal atau menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka yang relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengetahuan sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial serta adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendididkannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengetahuan secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan masyarakat sendiri".

b. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Nandraha (1970:71) membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada dalam proses masyarakat desa berpartisipasi.

Menurut Batten dalam Yanti Winda (2020:29) pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mula mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka yang kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan, dan ruang lingkup pembangunannya.

Berikut ini penjelasannya mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006-18-20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable);
2. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan;
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan ini (meliputi

pengairan, jalan, lingkungan, pemukiman, dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawaaan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1. Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Menurut Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (2008) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi

dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

2. Kerangka Hukum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, yaitu :

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).

- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
 - d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
 - e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
 - f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
4. Prinsi-Prinsip Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Prinsip-prinsip musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

- a. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak

yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.

- b. Prinsip musyawarah. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosioekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
- c. Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
- d. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.
- e. Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.

- f. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui tahapan yang sistematis dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi dari sistem perencanaan pembangunan tersebut adalah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang merupakan forum partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa. Melalui Musrenbangdes, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, serta kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan di desa.

Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pelaksanaan Musrenbangdes memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti

rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya penyelarasan antara usulan masyarakat dengan program yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dalam proses perencanaan, serta koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait. Apabila Musrenbangdes dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan hasil perencanaan pembangunan desa akan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

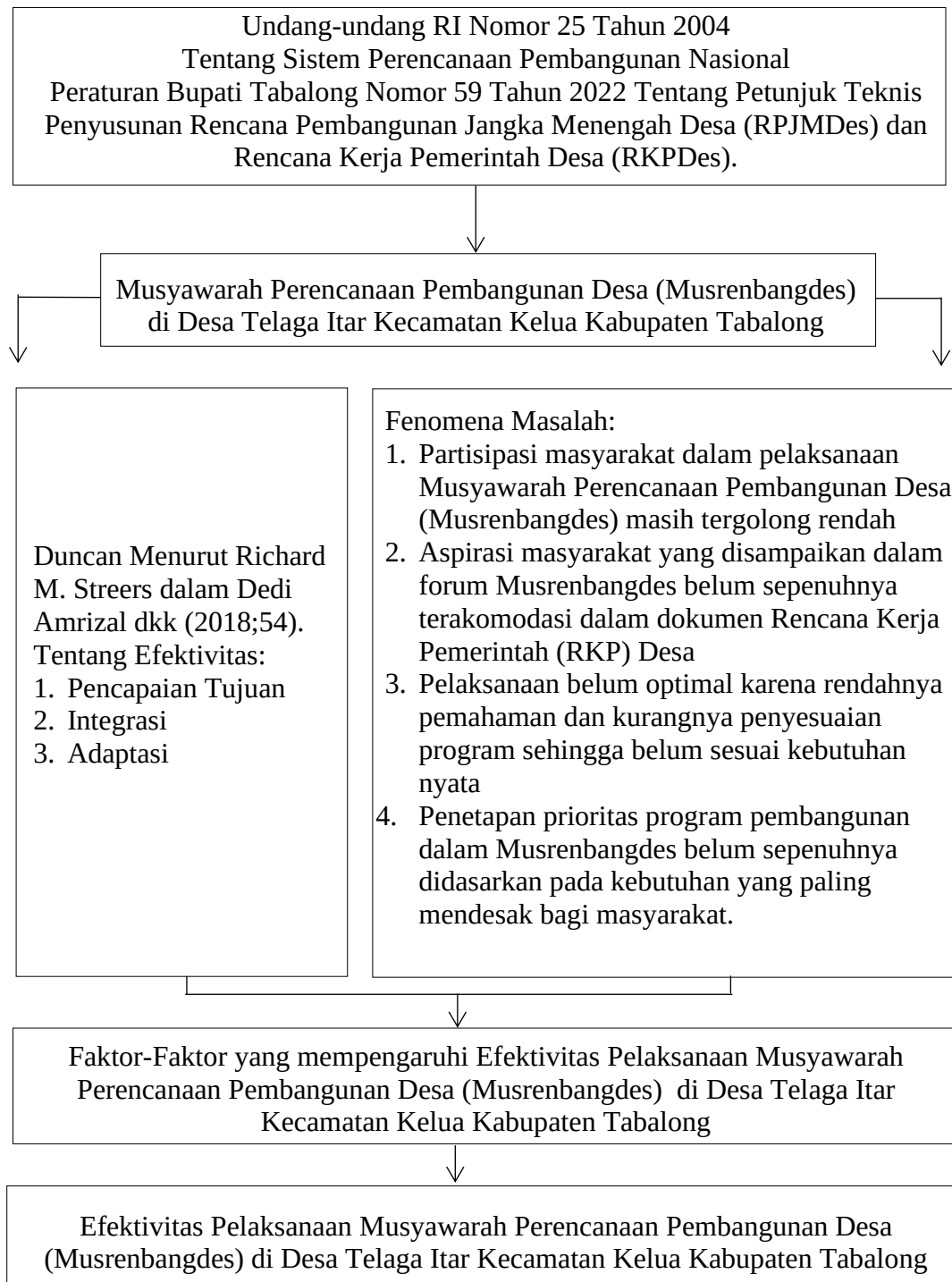
Dengan demikian, apabila pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, perencanaan yang baik akan berdampak pada meningkatnya efektivitas pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan kerangka pemikir di atas, maka peneliti berkeyakinan bahwa dengan melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”** dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan yang masih jauh dikatakan baik dalam pengelolaan sampah.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema gambar dibawah ini:

Adapun kerangka pemikiran yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamatkan Jalan Jendral Ahmad Yani Kode pos 71552.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian.

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:53) pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat *multidimensional*, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan matematis). Manusia pada hakikatnya lebih banyak berkaitan dengan kualitas, yang oleh karenanya pendekatan kualitatif adalah bersifat alamiah (natural), *konsektual*, mengutamakan *perspektif emic*, bersifat deskriptif dan berorientasi proses, mengutamakan data langsung dan *purposive*, dengan induktif yang berlangsung selama proses penelitian, dimana peneliti berperan sebagai alat utamanya (*key instrument*).

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif. Penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut

dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dan sasaran penelitian.

Pada pendekatan ini, penulis mencoba menggambarkan bagaimana Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kepolisian Sektor Pugaan Resor Tabalong Kabupaten Tabalong. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian penulis dapat memahami secara mendalam fenomena-fenomena yang diteliti guna mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Nasution dalam Naamy Nazar (2019:115-116) data adalah sebagai kebenaran sementara dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari fakta yang menjadi sumber pengamatan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sapari Imam Asyari dalam Naamy Nazar (2019:116), data merupakan fakta-fakta atau keterangan atau informasi yang digunakan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan atau membuat keputusan.

Menurut Ibrahim (2018:68) Data dalam penelitian sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Menurut Ibrahim (2018:68) data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Menurut

Bungin dalam Ibrahim (2018:66) Data primer adalah sebagai data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama di lapangan.

2) Data Sekunder

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:69) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder ini menurutnya terbagi kedalam dua bentuk; *pertama*, internal data, yang tersedia tertulis pada sumber data sekunder; *Kedua*, eksternal data, yang diperoleh dari sumber luar seperti data sensus atau data statistik.

2. Sumber Data

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:67), sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori dalam Ibrahim (2018:67) sumber data berupa benda, orang maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang sosial *situation* dalam objek material penelitian (sumber informasi). Sumber data yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Menurut Ibrahim (2018:72) *purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu dalam benaknya. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kaur Perencanaan	1 Orang
4	BPD	1 Orang
5	RT	4 Orang
6	Masyarakat	4 Orang
	Jumlah	12 Orang

(Sumber: Data Pribadi, 2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:122) operasional adalah mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Cara mengumpulkan dan mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dalam pengelolaan. Dengan demikian dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Instrumen dalam penelitian ilmu sosial adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan.

Tabel 3.2
Desain Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas, Duncan Menurut Richard M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk(2018:54).	1. Pencapaian Tujuan	a. Kesesuaian Hasil Dengan Kebutuhan Masyarakat b. Usulan Terakomodasi c. Kepuasan Masyarakat
	2. Adaptasi	a. Partisipasi Masyarakat b. Keterlibatan Unsur Masyarakat c. Keterbukaan Komunikasi d. Kemampuan Dalam Menyesuaikan Kondisi Lingkungan Yang Dihadapi
	3. Integrasi	a. Kesesuaian Program b. Penentuan Program c. Keseimbangan Pembangunan d. Sumber Daya Manusia

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:81) observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra matasebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

Menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2018:81) dalam melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut sebagaimana dikatakan oleh Marshal, “...*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”.

2. Wawancara

Menurut Abdussamad Zuchri (2021:143) wawancara adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.

Menurut Denzin & Lincoln dalam Ibrahim (2018:88) Wawancara adalah salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara menurutnya adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2018:94) adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya *monumental* seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*) baik foto maupun bahan statistik menurut Nasution dalam Ibrahim (2018:94).

Menurut Ridjal dalam Ibrahim (2018:94) yang dimaksud dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa masa lalu tersebut.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara *diskriptif*. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Menurut Hafni Sahir Syafrida (2022:47-48) analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang

penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahapan ini peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pertanyaan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Uji Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan *referensi*, dan *member check* (Sugiyono, 2019:365-371).

1. Perpanjangan pengamatan, pada tahap ini peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
2. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (Teknik) dan berbagai waktu.
4. Menggunakan bahan *referensi* artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.
5. Mengadakan member *check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member *check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anonim, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Abdullah, Dudung (2014). *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Syakir Media Press.

Abror, Nurul (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri I Raden Intan Lampung.

Amalo, Christo Vorando. (2019). Soda Molek: Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, IV (2)

Amrizal, Dedi., dkk. (2018). *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah AQLI.

Aryadi, Tadi. (2020). *Analisis Efektifitas Kerja Pegawai*. Cirebon: CV. Elsi Pro.

Az-Zuhaili, Wahbah (2009). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djohani, Rianingsih (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Sumedang: Perpustakaan Nasional.

Hidayat, Bachtari Alam., dkk. (2024). *Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik Sesuai Peraturan Menteri Agrarian Nomor 19 Tahun 2020*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Ibrahim M.A. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Joko, Enny Abadi., dkk. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.

Koentjaraningrat (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mokoginta, Raldy H, dkk. (2021). “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi dan Layanan Pengaduan (Kinalang) pada Era New Normal di Kota Kotamobagu.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 10 No. 110.

Mutiarin, Dyah dan Zainudin, Arif. (2020). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Naamy, Nazar. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Nasution, A. F. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Harfa Creative.

Nuari. Fadilla (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Nugraha, Ade Septia (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Raharjo, Muhammad Mu'iz (2021). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sjafrizal, (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Robinson (2010). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Theresia, Aprillia dkk (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Yanti, Winda (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru, Cangking dan Telaga Hanyar)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.